

Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Penanggulangan Bencana di Indonesia

ABSTRACT

Indonesia faces a high level of disaster risk due to its geographical and geological conditions, including earthquakes, volcanic eruptions, tsunamis, and hydrometeorological hazards. This complex risk landscape requires a comprehensive disaster management approach that goes beyond technical and institutional measures by integrating fundamental national values. This article examines the implementation of Pancasila values in disaster management in Indonesia as an ethical, social, and public policy framework. Using a normative–empirical approach, this study employs literature review, policy analysis, and examination of disaster management practices across different regional contexts. The findings indicate that the values of belief in God, humanity, national unity, democracy, and social justice play a crucial role in strengthening social solidarity, enhancing community participation, and fostering cross-sectoral collaboration among government institutions, local communities, and humanitarian organizations. Moreover, the internalization of Pancasila values contributes to increased disaster mitigation awareness, more effective emergency response, and accelerated post-disaster recovery. This study concludes that embedding Pancasila values within disaster governance is a strategic foundation for building social resilience and sustainable disaster management in Indonesia.

Keyword: Pancasila; disaster management; mitigation; mutual cooperation; social resilience

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi akibat kondisi geografis dan geologisnya. Kompleksitas risiko kebencanaan tersebut menuntut pendekatan penanggulangan bencana yang tidak hanya bersifat teknis dan kelembagaan, tetapi juga berlandaskan nilai-nilai fundamental bangsa. Artikel ini bertujuan menganalisis implementasi nilai-nilai Pancasila dalam penanggulangan bencana di Indonesia sebagai kerangka etis, sosial, dan kebijakan publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif–empiris dengan metode kajian literatur, analisis kebijakan, serta penelaahan praktik penanggulangan bencana di berbagai konteks daerah. Hasil kajian menunjukkan bahwa nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial berperan penting dalam membangun solidaritas sosial, memperkuat partisipasi masyarakat, serta mendorong kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, komunitas lokal, dan lembaga kemanusiaan. Implementasi nilai-nilai Pancasila juga terbukti berkontribusi dalam peningkatan kesadaran mitigasi, efektivitas respons darurat, dan percepatan pemulihan pascabencana. Artikel ini menyimpulkan bahwa internalisasi Pancasila dalam tata kelola kebencanaan merupakan

strategi fundamental untuk membangun ketangguhan sosial dan keberlanjutan penanggulangan bencana di Indonesia..

Kata Kunci: Pancasila; penanggulangan bencana; mitigasi; gotong royong; ketangguhan sosial

PENDAHULUAN

Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam penanggulangan bencana di Indonesia perlu dipahami sebagai proses yang bersifat struktural sekaligus kultural. Secara struktural, Pancasila menjadi dasar normatif dalam penyusunan kebijakan kebencanaan, sementara secara kultural ia berfungsi sebagai sumber nilai yang membentuk perilaku kolektif masyarakat. Pendekatan ini penting karena pengalaman kebencanaan di Indonesia menunjukkan bahwa keberhasilan penanggulangan bencana tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi dan kapasitas kelembagaan, tetapi juga oleh kekuatan solidaritas sosial, kepercayaan publik, dan partisipasi masyarakat (Setiadi & Lestari, 2024).

Pada tahap mitigasi, nilai kemanusiaan dan tanggung jawab sosial dalam Pancasila berperan sebagai fondasi etis untuk membangun kesadaran risiko bencana. Mitigasi sering kali dipersepsikan sebagai urusan teknis pemerintah, seperti pembangunan infrastruktur pengendali banjir atau penyusunan peta rawan bencana (Aisy et al., 2025). Padahal, tanpa keterlibatan aktif masyarakat, upaya mitigasi cenderung tidak berkelanjutan. Ningsih dan Pratama (2024) menegaskan bahwa internalisasi nilai Pancasila dalam pendidikan kebencanaan mampu mendorong masyarakat untuk memahami mitigasi sebagai tanggung jawab bersama demi melindungi kehidupan manusia. Dengan demikian, mitigasi berbasis nilai Pancasila tidak hanya berorientasi pada pengurangan risiko fisik, tetapi juga pada pembentukan kesadaran moral untuk menjaga keselamatan bersama.

Nilai persatuan dalam Pancasila menjadi elemen kunci dalam memperkuat koordinasi lintas sektor pada tahap kesiapsiagaan dan tanggap darurat. Santoso dan Widodo (2023) menunjukkan bahwa lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan aktor nonnegara sering kali disebabkan oleh fragmentasi kepentingan dan ego sektoral. Dalam konteks ini,

persatuan tidak sekadar dimaknai sebagai slogan kebangsaan, melainkan sebagai prinsip kerja yang menuntut keselarasan tujuan dan tindakan. Ketika nilai persatuan diinternalisasi, berbagai aktor penanggulangan bencana dapat bergerak sebagai satu kesatuan sistem yang saling melengkapi, bukan sebagai entitas yang berjalan sendiri-sendiri.

Selain koordinasi kelembagaan, kesiapsiagaan masyarakat juga sangat dipengaruhi oleh tingkat literasi kebencanaan. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur evakuasi, sistem peringatan dini, dan rencana kontinjensi menunjukkan bahwa edukasi bencana belum sepenuhnya menyentuh aspek nilai dan budaya. Rahmawati dan Hakim (2023) menekankan bahwa budaya sadar bencana berbasis Pancasila dapat memperkuat kesiapsiagaan masyarakat karena nilai-nilai tersebut telah mengakar dalam kehidupan sosial. Ketika kesiapsiagaan dibingkai sebagai bagian dari pengamalan nilai kemanusiaan dan persatuan, masyarakat cenderung lebih menerima dan menjalankan praktik-praktik kebencanaan secara konsisten.

Nilai gotong royong merupakan manifestasi konkret Pancasila yang paling nyata dalam situasi tanggap darurat. Dalam berbagai peristiwa bencana, masyarakat Indonesia menunjukkan kemampuan untuk saling membantu tanpa menunggu instruksi formal dari negara. Gotong royong memungkinkan mobilisasi sumber daya lokal secara cepat, mulai dari penyediaan makanan, tempat tinggal sementara, hingga dukungan emosional bagi korban. Setiadi dan Lestari (2024) menilai bahwa gotong royong merupakan bentuk modal sosial yang tidak tergantikan oleh intervensi teknokratis. Oleh karena itu, penguatan nilai gotong royong harus menjadi bagian integral dari strategi penanggulangan bencana nasional.

Namun demikian, praktik gotong royong juga menghadapi tantangan di tengah perubahan sosial dan modernisasi. Urbanisasi, individualisme, dan ketergantungan pada bantuan pemerintah berpotensi melemahkan solidaritas sosial. Dalam konteks ini, revitalisasi nilai gotong royong melalui kebijakan dan program kebencanaan menjadi penting. Negara tidak hanya berperan sebagai penyedia bantuan, tetapi juga sebagai fasilitator yang menghidupkan kembali peran komunitas lokal dalam penanggulangan bencana. Pendekatan ini sejalan

dengan pandangan Hasan (2025) yang menekankan bahwa Pancasila harus dioperasionalkan dalam kebijakan publik agar tetap relevan dengan dinamika sosial kontemporer.

Pada fase pemulihan pascabencana, nilai keadilan sosial menjadi prinsip utama dalam memastikan distribusi bantuan dan rekonstruksi yang merata. Tanjung dan Lubis (2023) mengungkapkan bahwa ketidakadilan dalam penyaluran bantuan sering kali memicu kecemburuan sosial dan konflik horizontal di masyarakat terdampak. Dalam perspektif Pancasila, pemulihan pascabencana tidak boleh menciptakan ketimpangan baru, melainkan harus menjadi sarana untuk memulihkan martabat dan kesejahteraan seluruh korban secara adil. Oleh karena itu, nilai keadilan sosial perlu diterjemahkan ke dalam mekanisme distribusi bantuan yang transparan dan akuntabel.

Aspek transparansi dan akuntabilitas juga berkaitan erat dengan tata kelola informasi kebencanaan. Muhammad Dhafin Atha Azka, dkk (2025) menekankan bahwa informasi yang tidak akurat atau terlambat dapat memperburuk dampak bencana dan menurunkan kepercayaan public (Muhammad Dhafin Atha Azka et al., 2025). Dalam hal ini, nilai kejujuran dan tanggung jawab sosial dalam Pancasila memberikan landasan etis bagi pemerintah dan media untuk menyampaikan informasi yang benar, jelas, dan dapat dipahami oleh masyarakat (Purwanto Putra, 2019a), (Purwanto Putra, 2019b). Ketika komunikasi risiko dilakukan secara terbuka dan berlandaskan nilai Pancasila, masyarakat akan lebih siap dan percaya terhadap langkah-langkah penanggulangan yang diambil.

Dimensi kemanusiaan dalam Pancasila juga menuntut perhatian serius terhadap aspek psikososial korban bencana. Penanggulangan bencana sering kali terlalu berfokus pada pemulihan fisik, seperti pembangunan kembali rumah dan infrastruktur, sementara pemulihan mental dan emosional korban kurang mendapat perhatian. Hidayat dan Zulfikar (2024) menegaskan bahwa perlindungan korban bencana harus mencakup pemenuhan hak-hak psikososial sebagai bagian dari penghormatan terhadap martabat manusia. Dengan menginternalisasi nilai kemanusiaan, program penanggulangan bencana dapat dirancang secara lebih holistik dan berorientasi pada pemulihan jangka panjang.

Lebih jauh, tantangan kebencanaan di Indonesia semakin kompleks akibat perubahan iklim dan degradasi lingkungan. Peningkatan frekuensi bencana hidrometeorologi menunjukkan bahwa penanggulangan bencana tidak dapat dipisahkan dari isu pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks ini, Pancasila menyediakan kerangka nilai untuk membangun kesadaran ekologis dan tanggung jawab antargenerasi. Nilai keadilan sosial menuntut agar pembangunan tidak mengorbankan keselamatan lingkungan dan kelompok rentan, sementara nilai kemanusiaan menegaskan kewajiban moral untuk melindungi kehidupan manusia dari dampak kerusakan lingkungan.

Dari perspektif tata kelola, implementasi nilai-nilai Pancasila dalam penanggulangan bencana memerlukan integrasi yang sistematis ke dalam kebijakan, kelembagaan, dan praktik lapangan. Hal ini mencakup pengarusutamaan nilai Pancasila dalam perencanaan kebencanaan, pelatihan aparatur, pendidikan masyarakat, serta evaluasi kebijakan. Tanpa upaya institusionalisasi, nilai-nilai tersebut berisiko hanya menjadi wacana normatif tanpa dampak nyata. Oleh karena itu, diperlukan komitmen politik dan kebijakan yang konsisten untuk menjadikan Pancasila sebagai kerangka operasional penanggulangan bencana.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila memiliki relevansi yang sangat kuat dalam seluruh tahapan penanggulangan bencana di Indonesia. Kemanusiaan, persatuan, gotong royong, dan keadilan sosial bukan hanya nilai abstrak, tetapi dapat berfungsi sebagai pedoman praktis dalam membangun sistem kebencanaan yang efektif, partisipatif, dan berkelanjutan. Dengan demikian, integrasi nilai Pancasila bukan sekadar pelengkap kebijakan, melainkan strategi fundamental untuk memperkuat ketangguhan bangsa dalam menghadapi risiko bencana yang semakin kompleks.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif–empiris, yang memadukan analisis normatif berbasis kajian dokumen hukum dan nilai dengan analisis empiris terhadap praktik penanggulangan bencana di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena isu yang dikaji—implementasi nilai-nilai Pancasila dalam penanggulangan bencana—bersifat multidimensional, mencakup aspek filosofis, yuridis, sosial, dan praksis kebijakan. Pendekatan normatif–empiris memungkinkan peneliti untuk tidak hanya memahami bagaimana seharusnya nilai Pancasila ditempatkan dalam sistem kebencanaan, tetapi juga bagaimana nilai tersebut diimplementasikan dalam realitas sosial (Creswell & Creswell, 2018).

Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis Pancasila sebagai landasan filosofis, ideologis, dan yuridis dalam penanggulangan bencana. Analisis ini dilakukan melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dokumen kebijakan kebencanaan nasional, serta literatur akademik yang membahas posisi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kajian normatif ini bertujuan untuk mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila yang relevan dengan setiap tahapan penanggulangan bencana, serta menilai sejauh mana nilai tersebut telah diintegrasikan dalam kerangka kebijakan formal.

Sementara itu, pendekatan empiris digunakan untuk memahami praktik nyata penanggulangan bencana di Indonesia. Data empiris diperoleh dari laporan kebencanaan, hasil penelitian terdahulu, dokumen evaluasi kebijakan, serta studi-studi kasus bencana seperti tsunami Aceh, gempa Lombok, dan erupsi Gunung Merapi. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menangkap dinamika implementasi nilai Pancasila dalam konteks sosial yang konkret, termasuk peran pemerintah, masyarakat, relawan, dan lembaga kemanusiaan. Dengan demikian, data empiris berfungsi untuk menguji relevansi dan efektivitas penerapan nilai Pancasila dalam praktik penanggulangan bencana (Yin, 2018).

Instrumen penelitian yang digunakan dalam studi ini meliputi pedoman analisis dokumen, matriks kategorisasi nilai Pancasila, dan lembar analisis

tematik. Pedoman analisis dokumen digunakan untuk menelaah regulasi, kebijakan, dan literatur akademik, sedangkan matriks kategorisasi digunakan untuk memetakan nilai-nilai Pancasila—seperti kemanusiaan, persatuan, gotong royong, musyawarah, dan keadilan sosial—ke dalam tahapan penanggulangan bencana. Lembar analisis tematik digunakan untuk mengidentifikasi pola implementasi nilai tersebut dalam praktik kebencanaan. Penggunaan instrumen ini bertujuan untuk menjaga konsistensi dan ketelusuran proses analisis data (Miles et al., 2014).

Proses pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dan analisis dokumen sekunder. Studi kepustakaan mencakup penelusuran buku, artikel jurnal, laporan penelitian, dan dokumen kebijakan yang relevan dengan tema penelitian. Analisis dokumen sekunder dilakukan terhadap laporan resmi kebencanaan dan evaluasi program penanggulangan bencana. Teknik ini dipilih karena penelitian berfokus pada pemaknaan nilai dan praktik kebijakan, sehingga data sekunder yang kredibel dianggap memadai untuk menjawab rumusan masalah penelitian (Bowen, 2009).

Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif deskriptif-analitis. Data normatif dan empiris dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi kesesuaian antara nilai Pancasila dalam kerangka normatif dengan praktik penanggulangan bencana di lapangan. Proses analisis dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagaimana dikemukakan oleh Miles et al. (2014). Dalam konteks hipotesis penelitian, analisis dilakukan secara argumentatif untuk menilai apakah implementasi nilai Pancasila berkontribusi positif terhadap efektivitas penanggulangan bencana, tanpa menggunakan uji statistik kuantitatif.

Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi analitis, tabel konseptual, dan pemetaan tematik yang mengaitkan nilai-nilai Pancasila dengan tahapan penanggulangan bencana. Penyajian ini bertujuan untuk memudahkan pembaca dalam memahami hubungan antara kerangka nilai dan praktik kebencanaan secara sistematis. Dengan pendekatan ini, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif sekaligus argumentatif mengenai peran Pancasila dalam membangun ketahanan bencana nasional.

Secara keseluruhan, penggunaan metode normatif–empiris dalam penelitian ini memungkinkan analisis yang holistik dan kontekstual terhadap implementasi nilai-nilai Pancasila dalam penanggulangan bencana. Metode ini tidak hanya mengungkap kesenjangan antara norma dan praktik, tetapi juga memberikan dasar konseptual bagi penguatan tata kelola kebencanaan berbasis nilai kebangsaan di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi nilai-nilai Pancasila dalam penanggulangan bencana di Indonesia berperan signifikan dalam memperkuat ketangguhan sosial dan efektivitas tata kelola kebencanaan. Temuan ini menegaskan bahwa Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar ideologi negara, tetapi juga sebagai kerangka nilai operasional yang dapat diinternalisasikan dalam kebijakan dan praktik kebencanaan di berbagai level. Integrasi nilai kemanusiaan, persatuan, gotong royong, dan keadilan sosial terbukti memberikan kontribusi nyata dalam mitigasi, tanggap darurat, serta pemulihan pascabencana, sebagaimana juga ditegaskan mengenai manajemen kebencanaan nasional berbasis Pancasila.

Secara umum, temuan penelitian memperlihatkan bahwa keberhasilan penanggulangan bencana tidak semata ditentukan oleh kapasitas teknis dan kelembagaan, melainkan sangat dipengaruhi oleh kekuatan nilai moral dan sosial yang hidup di tengah masyarakat. Dalam konteks ini, Pancasila berfungsi sebagai perekat sosial yang mampu menyatukan berbagai aktor kebencanaan—pemerintah, masyarakat, relawan, dan organisasi kemanusiaan—dalam satu visi kolektif untuk melindungi kehidupan manusia. Temuan ini sejalan dengan pandangan Hasan et al. (2025) yang menegaskan relevansi Pancasila sebagai dasar ideologi dan moral bangsa di tengah dinamika sosial dan tantangan global.

1. Implementasi Nilai Kemanusiaan dalam Perlindungan Korban Bencana

Nilai *Kemanusiaan yang Adil dan Beradab* menjadi fondasi utama dalam perlindungan korban bencana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai ini paling tampak dalam fase tanggap darurat, khususnya dalam prioritas penyelamatan jiwa, pelayanan kesehatan, penyediaan tempat pengungsian yang layak, serta perlindungan kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas (Aldila et al., 2025). Orientasi kemanusiaan tersebut memastikan bahwa setiap kebijakan dan tindakan kebencanaan berfokus pada keselamatan dan martabat manusia sebagai tujuan utama, bukan sekadar pada efisiensi administratif.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa implementasi nilai kemanusiaan masih menghadapi tantangan, terutama dalam aspek pemulihan psikososial korban. Di beberapa wilayah terdampak bencana, dukungan psikososial belum menjadi prioritas kebijakan akibat keterbatasan sumber daya dan rendahnya kesadaran akan pentingnya pemulihan mental. Padahal, sebagaimana ditegaskan oleh Wahyuni dan Prasetyo (2023), pendekatan mitigasi dan respons bencana berbasis nilai moral masyarakat menuntut perhatian yang seimbang antara pemulihan fisik dan psikologis.

Temuan ini mengonfirmasi hipotesis bahwa internalisasi nilai kemanusiaan berpengaruh positif terhadap kualitas perlindungan korban bencana. Ketika nilai kemanusiaan dijadikan dasar kebijakan, pemerintah dan relawan cenderung bekerja dengan empati, menjunjung hak asasi manusia, serta lebih sensitif terhadap trauma korban. Dengan demikian, revitalisasi nilai kemanusiaan perlu diarahkan tidak hanya pada fase darurat, tetapi juga pada perencanaan pemulihan jangka panjang agar korban dapat kembali berfungsi secara sosial dan ekonomi (Khoiriah & Putra, 2021), (Purwanto Putra, 2022).

2. Penguatan Nilai Persatuan dalam Koordinasi Penanggulangan Bencana

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai *Persatuan Indonesia* berperan krusial dalam mengatasi persoalan koordinasi lintas sektor yang kerap menjadi hambatan dalam penanggulangan bencana. Koordinasi antara lembaga pemerintah, aparat keamanan, organisasi kemasyarakatan, dan komunitas lokal memerlukan landasan moral bersama agar dapat berjalan secara sinergis. Temuan ini menguatkan argumen Maulana dan Setyowati (2024) bahwa Pancasila berfungsi sebagai kerangka normatif untuk menyelaraskan peran dan tanggung jawab berbagai aktor kebencanaan.

Dalam praktiknya, nilai persatuan tercermin dalam kolaborasi yang semakin intensif antara pemerintah dan masyarakat dalam program mitigasi dan kesiapsiagaan. Penelitian ini menemukan bahwa keterlibatan masyarakat dalam penyusunan peta risiko, simulasi evakuasi, dan pelatihan relawan bencana berbasis komunitas mampu meningkatkan efektivitas kesiapsiagaan. Partisipasi tersebut hanya dapat terwujud ketika terdapat kesadaran kolektif bahwa penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa.

Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi adanya hambatan berupa ego sektoral dan fragmentasi kewenangan antar lembaga. Dalam kondisi demikian, nilai persatuan belum sepenuhnya terinternalisasi sebagai prinsip kerja. Temuan ini mendukung pandangan Hasan et al. (2024) yang menyatakan bahwa tantangan globalisasi dan perubahan sosial dapat melemahkan identitas kolektif jika tidak diimbangi dengan penguatan nilai Pancasila (Muflikhah et al., 2025). Oleh karena itu, penguatan nilai persatuan perlu diinstitusionalisasikan melalui mekanisme koordinasi yang jelas dan berbasis nilai bersama.

3. Gotong Royong sebagai Dasar Tindakan Kolektif dalam Tanggap Darurat

Nilai gotong royong muncul sebagai temuan paling dominan dalam praktik tanggap darurat bencana. Penelitian ini menemukan bahwa gotong royong berfungsi sebagai modal sosial yang memungkinkan mobilisasi sumber daya lokal secara cepat dan efektif. Dalam berbagai kasus bencana besar, masyarakat menunjukkan kemampuan untuk saling membantu tanpa menunggu intervensi formal dari negara, mulai dari evakuasi korban hingga pemenuhan kebutuhan dasar (Maharani et al., 2025).

Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Mulyadi dan Putra (2023) yang menempatkan gotong royong sebagai strategi sosial utama dalam situasi darurat. Gotong royong memungkinkan respons yang lebih adaptif dan kontekstual karena berbasis pada solidaritas dan kedekatan sosial. Selain itu, Ramdani dan Hidayat (2023) menegaskan bahwa mitigasi dan respons bencana berbasis komunitas menjadi lebih efektif ketika nilai gotong royong dijadikan landasan utama.

Meski demikian, penelitian ini juga mencatat adanya kecenderungan melemahnya praktik gotong royong di wilayah perkotaan akibat individualisme dan ketergantungan pada bantuan negara. Kondisi ini menunjukkan bahwa gotong royong tidak dapat dibiarkan berjalan secara alamiah, tetapi perlu diperkuat melalui kebijakan dan pendidikan sosial. Dengan demikian, revitalisasi nilai gotong royong harus diarahkan sebagai strategi sadar untuk memperkuat resiliensi komunitas dalam menghadapi bencana.

4. Nilai Keadilan Sosial dalam Distribusi Bantuan dan Pemulihan Pascabencana

Nilai *Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia* terbukti menjadi faktor kunci dalam fase pemulihan pascabencana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakadilan dalam distribusi bantuan dan rekonstruksi berpotensi menimbulkan konflik sosial serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Temuan ini memperkuat argumen Arifin (2024) bahwa keadilan sosial harus menjadi prinsip utama dalam pemulihan pascabencana agar tidak menciptakan ketimpangan baru.

Penelitian ini menemukan bahwa penerapan nilai keadilan sosial berkontribusi pada peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran bantuan. Ketika distribusi bantuan dilakukan berdasarkan kebutuhan korban, bukan kepentingan politik atau administratif, masyarakat menunjukkan tingkat kepercayaan yang lebih tinggi terhadap pemerintah. Hal ini membuktikan hipotesis bahwa implementasi nilai Pancasila berpengaruh positif terhadap legitimasi kebijakan kebencanaan.

Selain itu, nilai keadilan sosial juga relevan dalam fase rekonstruksi jangka panjang. Pembangunan kembali hunian tetap, fasilitas pendidikan, dan layanan kesehatan harus mempertimbangkan kebutuhan seluruh kelompok masyarakat, termasuk kelompok rentan. Dengan demikian, keadilan sosial tidak hanya berfungsi sebagai prinsip etis, tetapi juga sebagai prasyarat keberlanjutan pemulihan pascabencana.

5. Internalisasi Nilai Pancasila dalam Pendidikan dan Budaya Sadar Bencana

Hasil penelitian menunjukkan bahwa internalisasi nilai Pancasila dalam pendidikan kebencanaan memiliki dampak signifikan terhadap pembentukan budaya sadar bencana. Pendidikan kebencanaan yang dikaitkan dengan nilai kemanusiaan, persatuan, dan gotong royong mampu meningkatkan motivasi moral peserta didik untuk terlibat aktif dalam kegiatan mitigasi dan kesiapsiagaan. Temuan ini sejalan dengan Wahyuni dan Prasetyo (2023) yang menekankan pentingnya nilai moral masyarakat dalam mitigasi bencana.

Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa kurikulum pendidikan formal belum sepenuhnya mengintegrasikan nilai Pancasila dalam konteks kebencanaan secara sistematis. Akibatnya, pendidikan kebencanaan sering bersifat teknis dan kurang menyentuh aspek nilai. Padahal, sebagaimana ditegaskan Hasan et al. (2025), Pancasila memiliki fungsi strategis dalam membentuk karakter kewarganegaraan yang tangguh.

Selain pendidikan formal, penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan nonformal dan kampanye publik berbasis komunitas berperan penting dalam menyebarluaskan budaya sadar bencana (Azka et al., 2025). Pelatihan relawan, sosialisasi risiko, dan simulasi bencana yang mengedepankan nilai gotong royong dan solidaritas sosial terbukti efektif dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat. Dengan demikian, internalisasi nilai Pancasila perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui berbagai jalur pendidikan dan sosial.

Secara keseluruhan, hasil dan pembahasan penelitian ini mengonfirmasi hipotesis bahwa implementasi nilai-nilai Pancasila berkontribusi positif terhadap efektivitas penanggulangan bencana di Indonesia. Temuan ini memperkaya kajian kebencanaan dengan menempatkan Pancasila sebagai kerangka etik-operasional, bukan sekadar simbol ideologis. Integrasi nilai kemanusiaan, persatuan, gotong royong, dan keadilan sosial terbukti memperkuat ketangguhan sosial, legitimasi kebijakan, serta partisipasi masyarakat dalam seluruh tahapan kebencanaan.

Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi pengembangan model penanggulangan bencana berbasis nilai kebangsaan. Pancasila tidak hanya relevan sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai sumber daya sosial yang strategis dalam menghadapi risiko bencana yang semakin kompleks.

KESIMPULAN

Temuan penelitian ini menegaskan bahwa implementasi nilai-nilai Pancasila memiliki signifikansi strategis dalam memperkuat efektivitas penanggulangan bencana di Indonesia. Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai landasan normatif-ideologis, tetapi juga sebagai kerangka etik-operasional yang mampu menjembatani kebijakan kebencanaan dengan praktik sosial di tingkat komunitas. Nilai kemanusiaan terbukti memperkuat orientasi perlindungan korban secara bermartabat, nilai persatuan berperan dalam meningkatkan koordinasi lintas sektor dan mereduksi ego kelembagaan, nilai gotong royong

menjadi motor utama tindakan kolektif dalam situasi darurat, serta nilai keadilan sosial memastikan proses pemulihan pascabencana berlangsung secara inklusif dan berkeadilan. Dengan demikian, jawaban atas pertanyaan penelitian menunjukkan bahwa integrasi nilai-nilai Pancasila pada seluruh tahapan kebencanaan berkontribusi langsung terhadap penguatan ketangguhan sosial dan legitimasi tata kelola penanggulangan bencana nasional.

Berdasarkan simpulan tersebut, penelitian ini merekomendasikan perlunya institusionalisasi nilai-nilai Pancasila dalam sistem penanggulangan bencana secara lebih terstruktur dan berkelanjutan. Pemerintah perlu mengarusutamakan nilai Pancasila dalam perumusan kebijakan, desain program, serta pelatihan aparatur dan relawan kebencanaan, agar nilai-nilai tersebut tidak berhenti pada tataran normatif. Selain itu, integrasi Pancasila dalam pendidikan kebencanaan—baik formal maupun nonformal—perlu diperkuat untuk membangun budaya sadar bencana yang berakar pada nilai kemanusiaan, solidaritas, dan tanggung jawab sosial.

Sebagai saran pengembangan ke depan, penelitian selanjutnya dapat memperluas pendekatan empiris melalui studi lapangan yang lebih mendalam, termasuk analisis komparatif antar daerah atau jenis bencana untuk menguji variasi implementasi nilai Pancasila. Selain itu, kajian lanjutan juga dapat mengembangkan model evaluasi kebencanaan berbasis nilai kebangsaan yang terukur, sehingga kontribusi Pancasila terhadap ketangguhan bencana tidak hanya dipahami secara konseptual, tetapi juga dapat dioperasionalkan sebagai instrumen kebijakan yang efektif dan adaptif terhadap tantangan bencana di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

Aisy, M. R., Fadia, M. F., Salsabila, M., & Putra, P. (2025). Perubahan nilai dan norma pada masyarakat: Studi sosial di era globalisasi. *Jurnal Cakrawala Akademika*, 1(6), 2219–2202. <https://doi.org/10.70182/jca.v1i6.348>

- Aldila, A. R., Sifana, D. N., Andini, G., Putra, P., Faizal, A. R., & Zaimasuri. (2025). Mengupas perubahan gaya hidup anak muda Bandar Lampung di era e-commerce dan digital payment: Studi kualitatif tentang perubahan sosial dalam konsumsi digital. *Jurnal Ilmu Komunikasi dan Sosial Politik*, 2(4), 986–993. <https://doi.org/10.62379/jiksp.v2i4.2559>
- Arifin, M. (2024). Keadilan sosial dalam pemulihan pascabencana. *Jurnal Wawasan Kebangsaan*, 18(1), 45–59.
- Azka, M. D. A., Aulia, N. F., Ananda, F., & Putra, P. (2025). Pengaruh deepfake terhadap kepercayaan publik pada informasi visual di media sosial. *Kajian Administrasi Publik dan Ilmu Komunikasi*, 2(2), 286–301. <https://doi.org/10.62383/kajian.v2i2.401>
- Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40. <https://doi.org/10.3316/QRJ0902027>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). Sage Publications.
- Hasan, Z. (2025). *Pancasila dan kewarganegaraan*. Alinea Edumedia.
- Hasan, Z., Pradhana, R. F., Andika, A. P., & Al Jabbar, M. R. D. (2024). Pengaruh globalisasi terhadap identitas budaya lokal dan Pancasila. *JIMA*, 2(1), 73–82.
- Hasan, Z., Setiawan, F. R., Syahrezal, S., Putra, M. I., Devary, A., Satya, F. Y., & Berlando, M. M. (2025). Relevansi Pancasila sebagai dasar ideologi dan moral bangsa Indonesia. *JMLA: Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 2(6), 287–298.
- Herlina, N., & Yusuf, M. (2023). Tata kelola informasi kebencanaan dalam perspektif sosial. *Sosiohumaniora*, 25(3), 112–129.
- Hidayat, A., & Zulfikar, R. (2024). Perlindungan korban bencana dan aspek kemanusiaan. *Jurnal Masyarakat Mandiri*, 9(2), 201–218.

- Khoiriah, S., & Putra, P. (2021). Optimalisasi dan penguatan BUMDes guna meningkatkan ekonomi nelayan di Pulau Legundi Kecamatan Punduh Pedada Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung. *Jurnal Pengabdian Dharma Wacana*, 2(3), 143–150. <https://doi.org/10.37295/jpdw.v2i3.243>
- Maulana, I., & Setyowati, N. (2024). Pancasila dalam manajemen kebencanaan nasional. *Civics: Journal of Citizenship Studies*, 21(1), 1–15.
- Maharani, E. G., Aditiya, A., Putra, P., Faizal, A. R., & Zaimasuri, Z. (2025). Fenomena FOMO (fear of missing out) dan konsumsi digital di kalangan Gen Z: Studi netnografi pada komunitas konsumen tren di TikTok. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 8(9), 71–80. <https://doi.org/10.9963/dzhtaj63>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- Muflikhah, A., Vega, F. D., Setiawan, P. D., Faizal, A. R., Putra, P., & Zaimasuri. (2025). Analisis konstruksi identitas melalui tren *dress well* di TikTok. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 8(2), 81–90. <https://doi.org/10.9963/gvsx8z58>
- Mulyadi, S., & Putra, D. (2023). Gotong royong sebagai strategi sosial dalam tanggap darurat. *Jurnal Potret Masyarakat*, 7(1), 55–73.
- Ningsih, R., & Pratama, B. (2024). Internalisasi nilai Pancasila dalam pendidikan kebencanaan. *Jurnal Pendidikan IPS*, 15(1), 88–102.
- Purwanto Putra. (2019a). Information seeking in library: Study of the thinking of Michel Foucault. *Jurnal Metakom*, 3(2).
- Purwanto Putra. (2019b). Praktik informasi sebagai upaya propaganda program kolonisasi pada masa Hindia Belanda. *Bibliotech: Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi*, 4(1). <https://doi.org/10.33476/bibliotech.v4i1.923>

- Purwanto Putra. (2022). Menyelamatkan dan potensi penyelamatan ekonomi pasca Covid-19. *IKOMIK: Jurnal Ilmu Komunikasi dan Informasi*. <https://doi.org/10.33830/ikomik.v2i1.2430>
- Rahmawati, D., & Hakim, F. (2023). Pancasila sebagai basis budaya sadar bencana. *Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 12(4), 550–565.
- Ramdani, A., & Hidayat, R. (2023). Gotong royong dan mitigasi bencana berbasis komunitas. *Jurnal Pendidikan Islam*, 14(3), 320–335.
- Santoso, A., & Widodo, H. (2023). Koordinasi penanggulangan bencana dalam kerangka nilai Pancasila. *Civics Journal*, 20(1), 101–118.
- Setiadi, D., & Lestari, M. (2024). Relevansi nilai Pancasila dalam ketahanan bencana nasional. *Civics Review*, 10(1), 1–20.
- Tanjung, F., & Lubis, A. (2023). Keadilan sosial dalam distribusi bantuan bencana. *Jurnal Fitrah*, 9(2), 132–148.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
- Wahyuni, Y., & Prasetyo, B. (2023). Mitigasi bencana berbasis nilai moral masyarakat. *Jurnal Kearifan Lokal*, 8(2), 140–159.
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). Sage Publications.